

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENGANTISIPASI KARHUTLA DI KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MUHAMMAD DWIKY FIKRI

NPP. 29.1089

*Asdaf Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: kikidwiky11@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Kalimantan has a very diverse nature, one of which is forest wealth, now its existence is starting to be threatened due to forest and land fires caused by land clearing. South Barito Regency has become an emergency alert status for forest and land fires. **Purpose:** Based on this, the author aims to determine the role of the Regional Disaster Management Agency in South Barito Regency, Central Kalimantan Province. **Method:** This study uses a qualitative method with an inductive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The analysis uses the role theory of Soekanto (2012;212). **Result:** The results obtained from the research on the role of the Regional Disaster Management Agency in anticipating forest and land fires have been going well in accordance with existing regulations. However, it still has not succeeded optimally because it is constrained by several things, such as limited facilities and infrastructure and difficult or even unreachable disaster locations causing the handling of forest and land fires to be less than optimal in South Barito Regency, Central Kalimantan Province. In order to increase the role of the South Barito Regional Disaster Management Agency, it is necessary to evaluate and review the implementation of the role of the Regional Disaster Management Agency in anticipating forest and land fire disasters. **Conclusion:** The role of BPBD in South Barito Regency has been good in overcoming forest and land fires although there are some limitations.

Keywords: Role, Fires, Disaster Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kalimantan memiliki alam sangat beraneka ragam salah satunya kekayaan hutan, kini keberadaannya mulai terancam akibat pembakaran hutan dan lahan yang disebabkan pembukaan lahan. Kabupaten Barito Selatan menjadi memiliki status siaga darurat Karhutla. **Tujuan:** Berdasarkan hal tersebut penulis bertujuan untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori Peran dari Soekanto (2012;212). **Hasil/Temuan :** Hasil yang didapatkan dari penelitian Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan sudah berjalan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Namun masih belum berhasil secara maksimal

karena terkendala beberapa hal seperti keterbatasan sarana dan prasarana dan lokasi bencana yang sulit bahkan tidak terjangkau menyebabkan kurang maksimalnya penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Guna meningkatkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Barito Selatan perlu melakukan upaya evaluasi dan mengkaji ulang pelaksanaan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengantisipasi bencana Kebakaran hutan dan lahan. **Kesimpulan** : Peran BPBD Kabupaten Barito Selatan dalam sudah baik dalam mengatasi karhutla walaupun terdapat beberapa keterbatasan.

Kata Kunci; Peran, Kebakaran hutan dan lahan, Penanggulangan Bencana

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana merupakan rangkaian kegiatan yang mengancam serta mengusik kehidupan yang menimbulkan korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu bencana yang sangat merugikan adalah bencana kebakaran hutan dan lahan. Hutan berperan penting dalam ekosistem lingkungan hidup selain untuk menghasilkan oksigen juga untuk mencegah terjadinya bencana lainnya seperti banjir dan tanah longsor. Pemicu kebakaran hutan Menurut Darwiati dan Tuheteru (2010) kebakaran hutan dan lahan hampir 99% disebabkan oleh aktivitas orang baik disengaja ataupun tidak (faktor kelalaian). Diantara nilai persentase tersebut, aktivitas konversi lahan menyumbang 34%, peladangan liar 25%, pertanian 17%, kecemburuan sosial 14%, pekerjaan transmigrasi 8%; sedangkan hanya 1% yang diakibatkan oleh alam. Sebanyak 80% dari keseluruhan luas karhutlah pasca mengalami kebakaran telah menjadi lahan perkebunan. Bencana Karhutlah selalu menjadi ancaman dari tahun ke tahunnya di Indonesia khususnya pada wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Kalimantan merupakan pulau terbesar urutan nomor dua terluas di negara Indonesia dengan luas mencapai 743.330 km². Daerah yang memiliki kekayaan sumber daya hutan yang besar di Indonesia adalah Pulau Kalimantan namun dibalik kelebihan sumber daya alamnya masih mempunyai kendala dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Hutan Kalimantan yang sangat luas dan rindang kini keberadaan hutan tersebut sudah mulai terancam Karhutla khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun terus mengalami karhutla bahkan pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 134.227 hektar lahan dikutip dari http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran. Salah satu Kabupaten/Kota yang memiliki status siaga darurat Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Sukamara.

Ketika sudah memasuki musim kemarau tiba, bencana karhutlah menjadi ancaman yang sangat serius dan mengancam setiap waktu khususnya yang terjadi di wilayah kabupaten Barito Selatan pada tahun 2021 ini berstatus tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Salah satu tindakan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan membentuk tim pengawas dan pengendali kebakaran hutan dan lahan, dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya potensi bencana. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam mengantisipasi bencana karhutla yang sering terjadi tiap tahunnya telah menerapkan kebijakan Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pelaksanaan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengantisipasi dan penanggulangan bencana Kebakaran hutan dan lahan sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan kelestarian alam.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengantisipasi Karhutlah di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah penyebab dari kebakaran hutan dan lahan yang hampir 99% disebabkan oleh aktivitas manusia yang disengaja maupun tidak disengaja/kelalaian. Berdasarkan Persentasi Darwiati dan Tuheteru (2010) penyebab karhutlah adalah aktivitas konversi lahan menyumbang 34%, peladangan liar 25%, pertanian 17%, kecemburuan sosial 14%, pekerjaan transmigrasi 8%; sedangkan hanya 1% yang diakibatkan oleh alam. Sama halnya yang disampaikan oleh kepala BNPB Doni Monardo (2019) Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia faktornya merupakan 99% perbuatan manusia dan 1% nya merupakan alam, kemudian penyebab lainnya adalah tidak terencana sebab membuang bekas rokok ataupun pembakaran sampah, disengaja karena ingin membuka lahan, disengaja karena dibayar, dengan alasan dampak kurangnya lapangan kerja serta iklim yang ekstrim seperti musim kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan kekeringan, sumber energi berupa kayu dan lahan gambut. Sementara 80% dari keseluruhan luas karhutla pasca mengalami kebakaran telah menjadi lahan perkebunan. Karhutlah yang terjadi banyak disebabkan oleh kepentingan manusia untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Akibat ulah kepentingan manusia tersebut dengan penebangan ataupun pembakaran hutan dan lahan, alasan terjadinya kejadian tersebut adalah pembukaan lahan untuk ditanami berbagai jenis tanaman tertentu guna mendapatkan keuntungan dengan skala yang besar. Ancaman karhutlah menjadi sangat serius ketika telah memasuki musim kemarau sebab kebakaran mudah terjadi dan sangat sulit untuk melakukan penanggulangannya sehingga karhutlah menjadi bencana yang terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 telah terjadi karhutla terburuk dimana api telah membakar 134.227 ha lahan. Kabupaten Barito Selatan memiliki status siaga darurat karhutlah yang tinggi. Menanggapi permasalahan tersebut salah satu tindakan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan membentuk tim pengawas dan pengendali kebakaran hutan dan lahan, dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya potensi bencana. penyebab karhutlah yang karena ulah manusia sangat sulit dilakukan antisipasi dan pencegahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam peran penanggulangan bencana maupun dalam konteks Karhutla. Penelitian M Badri, Djuara Lubis, Djoko Susanto, Didik Suharjito yang berjudul sistem komunikasi peringatan dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau (Badri, Lubis,Susanto,& Suharjito;2018) menemukan bahwa menunjukkan bahwa sistem komunikasi peringatan dini kebakaran di Riau dilakukan secara holistik mulai level pengambil kebijakan, korporasi, organisasi masyarakat sipil, hingga ke masyarakat. Media yang paling banyak digunakan dalam menyampaikan pesan peringatan dini adalah WhatsApp, komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Komunikasi peringatan dini juga disampaikan melalui papan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) dan sosialisasi langsung kepada masyarakat (Badri, Lubis,Susanto,& Suharjito;2018). Penelitian Saharjo dan Syaufina berjudul upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di desa purwajaya kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kerta Negara Kalimantan Timur (Saharjo;2002), menemukan bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan ini merupakan faktor alam dan manusia terbagi menjadi dua sub faktor yaitu sub faktor langsung dan tidak langsung. Penelitian Saharjo dan Syaufina yang berjudul analisis kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau (Saharjo & Syaufina;2008) menemukan bahwa aktivitas masyarakat dalam pengelolaan lahan menggunakan metode tebas-bakar merupakan faktor yang

menyebabkan karhutla dan dapat terjadi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, di tanah mineral, dan gambut (Saharjo & Syaufina;2008).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengantisipasi Bencana Karhutla di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki status siaga karhutla setiap tahunnya, metode penelitan yang digunakan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian Badri dkk, Sahadjo, Saharjo, dan Syaufina. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori peran berdasarkan pendapat Soekanto (2012) yang menyatakan bahwa peran memiliki dimensi hak dengan indikator kesiapan anggaran, SDM, Pemenuhan sarana dan prasana serta dimensi kewajiban dengan indikator program, koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran, faktor penghambat, dan upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mengantisipasi Bencana Karhutla, di Kabupaten Bartio Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dan menganalisis data melalui reduksi data, data display/ penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing* atau *Verification*). Data diperoleh dengan teknik Tringualasi data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan teknik *purposive sampling* terhadap tujuh informan. Adapun analisis menggunakan teori peran dari Soekanto (2012) yang menyatakan bahwa peran memiliki dimensi hak dengan indikator kesiapan anggaran, SDM, Pemenuhan sarana dan prasana serta dimensi kewajiban dengan indikator program, koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mengantisipasi Bencana Karhutla, di Kabupaten Bartio Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, maka digunakan teori peran dari Soekanto (2012) yang menyatakan bahwa peran memiliki dimensi hak dengan indikator kesiapan anggaran, SDM, Pemenuhan sarana dan prasana serta dimensi kewajiban dengan indikator program, koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Tupoksi BPBD dalam Mengantisipasi Karhutla

Penulis melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan penanganan bencana dan penetapan daerah rawan karhutla. Dalam pelaksanaan tupoksi BPBD dalam mengantisipasi karhutla sudah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan sebagai berikut;

1. Tupoksi BPBD dalam mengantisipasi bencana merupakan hak dan kewajiban BPBD agar tercapainya tujuan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan hutan baik sesudah dan sebelum terjadinya bencana telah melaksanakan penanganan Bencana serta adanya bantuan dari pemerintah daerah untuk mendukung BPBD dalam mengantisipasi bencana karhutla.
2. BPBD wilayah Kabupaten Barito Selatan sudah mempunyai standar penanggulangan bencana, contohnya seperti pengelompokan daerah yang rentan terjadi bencana, pada hal ini ialah daerah yang rentan terjadi karhutla sudah dikategorikan yang mencapai tingkat kerentanan relatif tinggi hingga terendah. BPBD telah memetakan hotspot atau titik panas yang diperoleh dari BPBD Barito Selatan, di wilayah Kabupaten Barito Selatan terpadat Kecamatan yang paling rentan terjadi karhutla bertempat di kecamatan Jenamas dengan 159 titik panas, kemudian Kecamatan Dusun Hilir sebanyak 45 titik panas, kecamatan gunung Bintang Awai 30 titik panas, Kecamatan Dusun Selatan 28 titik panas, Kecamatan Dusun Utara 18 titik panas, Kecamatan Karau Kuala 15 titik panas, maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa persebaran titik panas di Kabupaten Barito Selatan berjumlah 295 titik panas.

3.2. Hak

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi hak, Dalam pelaksanaan mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan, perlu terpenuhinya hak untuk melaksanakan peran tersebut. Untuk itu dapat didefinisikan melalui beberapa indikator, sebagai berikut;

1. Kesiapan anggaran

BPBD Kabupaten Barito Selatan dalam kesiapan anggaran mengantisipasi bencana karhutla telah dianggarkan dalam rencana kerja anggaran (RKA) namun anggaran yang dimiliki tidak cukup dalam pengoperasian penanggulangan bencana karhutla karena banyak kebutuhan fasilitas dalam mengantisipasi karhutla.

2. Kesiapan SDM

Memahami bahwa sumber daya manusia ialah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak komunitas di instansi dan perusahaan yang berfungsi sebagai aset, sehingga kompetensinya harus dilatih dan dikembangkan agar lebih fasih terhadap langkah dalam mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan masih kekurangan tenaga terampil dan belum optimalnya pengetahuan untuk mengantisipasi bencana karhutla.

3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan unsur penting dalam keberhasilan dan kelancaran suatu kegiatan, Sarana yang memadai merupakan hak yang harus diperhatikan karna sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana baik sebelum hingga sesudah terjadinya bencana. BPBD Kabupaten Barito Selatan dalam kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi bencana karhutla masih kurang memadai seperti mobil patroli yang sudah usang.

3.3. Kewajiban

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi kewajiban, dalam melaksanakan peran BPBD dalam penanggulangan bencana terdapat kewajiban yang harus dipenuhi yaitu dapat didefinisikan beberapa indikator, sebagai berikut;

1. Program

BPBD memiliki program bantuan oleh BPBD Kabupaten Barito Selatan yaitu rekonstruksi wilayah daerah bencana dan pembangunan kembali smpas yang telah memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana di masa yang akan datang hingga sosialisasi tentang kebakaran hutan dan lahan. Program yang sudah dilaksanakan oleh BPBD yang dilakukan Bersama pihak-pihak yang terkait adalah melakukan sosialisasi bahayanya karhutla beserta dampak yang terjadi kemudian melakukan evaluasi dan observasi pasca bencana.

2. Koordinasi

Koordinasi merupakan proses serangkaian tindakan dengan tujuan mengintegrasikan serta menyelaraskan tujuan dan rencana kerja yang dikembangkan untuk semua elemen, bidang fungsional dan departemen, untuk secara efektif dan efisien menghasilkan tindakan yang terpadu dan terkoordinasi. BPBD Kabupaten Barito Selatan melakukan telah koordinasi proses mitigasi dengan OPD yang berkaitan dengan masalah penanggulangan bencana karhutla. Koordinasi telah dilakukan dengan OPD yang terkait seperti DLH, LHK, Manggala Agni, Polri/TNI dan Elemen Masyarakat lainnya untuk menyampaikan pandangan masukan dan saran. Rapat Koordinasi yang dilaksanakan yaitu penetapan status siaga darurat bencana karhutla

3. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses menanamkan nilai, norma dan aturan perilaku sosial dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi itu sendiri, manusia menyesuaikan diri dengan peran dan status sosialnya dalam kelompok masyarakat. Proses telah dilaksanakan sosialisasi kepada warga di seluruh wilayah yang rentan terjadinya karhutla untuk tidak mengabaikan bahayanya karhutla beserta dampak dari karhutla baik faktor alam hingga faktor non alam seperti pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat untuk bercocok tanam dan juga kepada sekolah – sekolah yang ada di Kabupaten Barito Selatan.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses mengidentifikasi indikator kinerja dan mengambil tindakan untuk membantu pencapaian hasil yang diharapkan terhadap kinerja yang telah ditentukan BPBD telah melakukan pengawasan terhadap rekonstruksi yang dilakukan dalam perbaikan lingkungan pasca bencana karhutla, yang diawasi dan dipantau dari awal rekonstruksi hingga sampai jadi 100%.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mengantisipasi Bencana Karhutla di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan dengan baik. Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah sesuai dengan SOP serta telah mendapat dukungan dari masyarakat yang peduli bencana karhutlah, kemudian telah ditetapkan daerah rawan karhutlah yang berguna untukantisipasi masyarakat serta pengurangan risiko sehingga kapasitas masyarakat menghadapi terjadinya bencana meningkat. Daerah rawan rawan sudah ditetapkan dari kategori tinggi sampai rendah dengan total persebaran titik panas di Kabupaten Barito Selatan berjumlah 285 titik panas. Dukungan untuk melaksanakan mitigasi karhutla memiliki masalah pada kesiapan anggaran yang terbatas, Sumber daya manusia yang belum memiliki keahlian kebencanaan, serta sarana dan prasarana yang terbatas. Penanggulangan bencana sudah dijalankan dengan baik melalui program bantuan pasca bencana BPBD namun BPBD tidak menekankan pada proses pencegahan penanggulangan bencana karhutla sehingga pengurangan risiko bencana masih belum berjalan baik. Koordinasi dengan OPD, Sosialisasi kepada masyarakat serta pengawasan sudah dijalankan dengan baik. Komunikasi peringatan dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan sangatlah penting, sistem komunikasi peringatan dini kebakaran harus dilakukan secara holistik mulai level pengambil kebijakan, korporasi, organisasi masyarakat sipil, hingga ke masyarakat seperti pada di Provinsi Riau (Badri, Lubis, Susanto, & Suharjito; 2018).

Temuan peneliti pada Karhutla yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan sering terjadi di wilayah yang memiliki akses sangat sulit untuk dilalui yang membuat proses penanganan karhutlah terhambat. Karakter hutan yang ada di Kalimantan adalah lahan gambut yang pada musim kemarau sangat kering ditambah tiupan angin kencang membuat penyebaran api sangat cepat dan menjalar ke tanaman yang lainnya. Kemudian oknum masyarakat sering melakukan pembakaran untuk membuka lahan baru karena lebih mudah dan cepat tanpa memikirkan dampak pada lingkungan serta hal tersebut membuat BPBD kualahan biasanya sebanyak 50 orang tidak sebanding dengan luasnya wilayah hutan dan lahan. Sama halnya yang terjadi pada Kabupaten Kutai Kerta Negara Kalimantan Timur (Saharjo; 2002) dan kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau Riau (Saharjo & Syaufina; 2008) yang menemukan bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia.

Menghadapi permasalahan tersebut Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan siswa terkait bahaya karhutla di Kabupaten Barito Selatan. Peningkatan sarana dalam mengantisipasi karhutla seperti pengadaan tabung oksigen bagi petugas yang bertugas memadamkan api dan menambah jumlah posko pemantauan titik rawan kebakaran di Kabupaten Barito Selatan. Sebelum terjadi karhutla, anggota dari BPBD dan seluruh sukarelawan yang turut bertugas membuat tempat penampungan air dengan menggunakan alat berat ekskavator sehingga dapat memperoleh sumber air terdekat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran BPBD dalam mengantisipasi karhutla di Kabupaten Barito Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana namun ketika implementasi di lapangan belum bisa berjalan secara maksimal dikarenakan ada beberapa kendala dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan seperti faktor internal dan eksternal, kemudian BPBD telah melaksanakan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan teori Soerjono Soekanto yaitu hak dan kewajiban. Peran mengandung arti sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan yang dapat diartikan sebagai peran suatu lembaga yang merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban suatu lembaga yang sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya. Peran BPBD terhambat sebab oknum warga yang belum mengerti bahaya, terbatasnya sarpras, wilayah yang sangat luas, lokasi di lahan gambut, belum maksimalnya sosialisasi. Kemudian upaya yang dilakukan BPBD untuk meningkatkan peran penanggulangan karhutla dengan cara meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan siswa terhadap bahaya karhutla, meningkatkan sarpras, penambahan jumlah posko pemantauan titik rawan kebakaran, serta membuat penampungan air. Guna meningkatkan peran BPBD disarankan melakukan pembinaan masyarakat, mengoptimalkan koordinasi dengan unsur terkait, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penanggulangan bencana dan menindak tegas pelaku pembakaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kabupaten saja padahal dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di pulau Kalimantan saling berkaitan satu sama lainnya serta keterbatasan penulis untuk mengungkap oknum yang memiliki kepentingan dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi lebih luas berkaitan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi Karhutla di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Barito Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Anggito Albi, dan Setiawan, Johan. 2018. Metode Penelitian Kualitatif, Sukabumi: CV Jejak.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ralph Linton, The Study of Man, an Introduction (New York: Applenton Century Crofts, 1956), hal 114
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),hal 212
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, hal 201
- Nazir, Moh. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 176 Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Nurjanah, dkk, 2013. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta Pamuladi, Bambang. 1999. Hukum Kehutanan Indonesia. Jakarta: PT. Rieneka Cipta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang – undangan :

- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Jurnal / Makalah :

- Syaufina, L. 2008. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Pola, penyebab dan dampak kebakaran. Bayumedia Publishing, Malang.
- Sahardjo BH. 2002. Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia. Di dalam: Workshop Nasional Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menghadapi Ancaman Bahaya El-Nino 2002; Bogor 9 April 2002. Bogor: Fakultas Kehutanan, IPB dan Kementerian Lingkungan Hidup. Hlm 1-17.

Sumber Link :

- <https://docplayer.info/41146500-2-2-penyebab-dan-dampak-kebakaran-hutan.html>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/bnpb-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-99-karena-ulah-manusia>
- https://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran
- <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/35148/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-kalteng-capai-369-92-ha>